

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit oleh bank di berikan kepada orang dan lembaga yang memerlukannya di bedakan dalam beberapa jenis kredit. Perbedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan dalam rangka *setting* kredit yang akan dilakukan oleh bank. Terdapat banyak jenis kredit yang di berikan oleh bank untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu : kredit yang dapat dilihat Dari Segi Tujuan Penggunaannya, Dari Segi Sektor Usaha Kredit, Dari Segi Jangka Waktu Kredit, dan Dari Segi Jaminannya. (www.ziddu.com)

Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". (Kasmir, 2008: 73)

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu,

pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit ini kita kenal dengan istilah Manajemen Kredit. (Kasmir, 2008)

Pada tahun 2007/2008 terjadi krisis global yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan perbankan. Kalangan perbankan melihat bahwa krisis global diperkirakan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam penyaluran kredit ke depan. Sebagian besar bankir yang diwawancarai mengatakan bahwa penyaluran total kredit saat ini masih cukup kuat, namun akan mengalami penurunan hingga akhir tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan akan sedikit membaik dari tahun 2008, tapi masih belum bisa pulih seperti saat sebelum terjadinya krisis global. Penurunan kredit yang paling besar diperkirakan akan terjadi pada sektor bangunan, diikuti oleh sektor jasa dan industri. (Jatiblog.Htm)

Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008 atau pada saat krisis global ternyata berdampak besar pada perekonomian dunia dan berkembang menjadi masalah yang serius. Karena hampir semua negara menerapkan sistem pasar bebas sehingga terkait satu sama lain. Aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain dengan regulasi moneter tiap negara yang beragam. Akibatnya setiap negara memiliki risiko terkena dampak krisis. (Jatiblog.Htm).

Dampak krisis global salah satunya adalah menerpa Inggris. Hingga Agustus 2008, dampak krisis global menyebabkan kenaikan angka pengangguran di

Inggris menjadi 1,79 juta atau meningkat 5,7 persen dari angkatan kerja. Mengapa Indonesia dapat bertahan dalam terpaan badai krisis global? Karena masih banyaknya sektor UMKM yang notabene sudah teruji kuat menghadapi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basis ekonomi bangsa dapat menjadi alternatif pilihan guna mengangkat perekonomian kita dari keterpurukan. Disaat banyak pengusaha-pengusaha besar yang kolaps akibat krisis moneter yang terjadi, justru para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak tersebar di seluruh kepulauan Indonesia masih tetap mampu bertahan dari terjangan krisis yang melanda pada saat itu. (Bloggerborneo)

Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor. (Jatiblog.Htm)

Ketika 2008 terjadi krisis global disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak terpengaruh dan terus bertahan. Bahkan, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat. Pada 2011 kontribusinya mencapai 61,9% dari total PDB, dengan rincian 36,28% dari usaha mikro, 10,9% dari usaha kecil, dan 14,7% dari usaha menengah. (www.newsbanking.com)

Kredit perbankan tetap tumbuh di tengah eksposur krisis global. Pertumbuhannya diprediksi mencapai 24%. Belum ada yang menggantikan posisi konsumen dan mikro sebagai penggerak pertumbuhan kredit perbankan. Sepanjang

perbankan nasional dapat mengalihkan bisnisnya dengan orientasi domestik dan mampu memberdayakan potensi yang ada (prospektif nasabah yang belum tergarap cukup besar, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM), kami melihat, kinerja perbankan dan pertumbuhan pinjaman pada 2012 masih cukup tinggi. Mungkin bisa sama dengan pertumbuhan pinjaman perbankan pada kuartal kedua tahun ini yang mencapai sekitar 24%. (infobank.news.com)

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu lembaga perbankan milik pemerintah yang kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan dan merupakan bank yang juga mengalami kredit macet. Usaha-usaha utama bidang keuangan yang dikelola oleh BRI meliputi (BRI, 2007) : (a) menghimpun dana, (b) menyalurkan dana, dan (c) menyediakan jasa bank lainnya seperti jasa setoran telepon, listrik, air, pembayaran uang kuliah, pembayaran gaji dan pensiun, kartu kredit, valas (valuta asing), dan jasa-jasa lainnya. Dalam kegiatan penyaluran dana, BRI mengembalikan dana yang dikelola ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip konvensional. Salah satu maksud dari pemberian kredit kepada masyarakat adalah untuk membiayai kegiatan bisnis mikro.

Dan pada tahun 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berhasil mengalahkan supremasi PT Bank Mandiri Tbk sebagai bank penyalur kredit terbesar yang dipegang selama sepuluh tahun. Pada April 2008, total kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp 123,05 triliun, sedangkan Bank Mandiri Rp 122,88 triliun. Data statistik perbankan Indonesia dari Bank Indonesia menunjukkan, penyaluran kredit BRI selama empat bulan pertama tahun ini tumbuh 32,6% dibanding periode sama tahun lalu. Sedangkan kredit Bank Mandiri pada saat yang sama meningkat 22,51%. (www.kalahkan-mandiri-penyaluran-kredit-bri.html).

Sampai dengan Desember 2007, *outstanding* kredit BRI mencapai Rp 113,853 triliun, meningkat sebesar Rp 23,570 triliun atau naik 26,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 90,283

triliun. Pertumbuhan kredit BRI tetap dimotori oleh segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan fokus utama pengembangan bisnis BRI. Portofolio pinjaman UMKM di BRI mencapai 80 persen dari total portofolio kredit BRI. Pertumbuhan kredit BRI yang tinggi tetap diikuti dengan kualitas yang terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan rasio NPL yang tercatat sebesar 3,44 persen. (www.bri.co.id)

Pada tahun 2001 telah diterapkan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran BI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, BRI melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas Pedoman Kerja (manual) BRI Unit bidang Kupedes yang telah ada. Hal ini tentu saja dengan mengacu pada Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Setelah itu, Pedoman Kerja BRI Unit bidang Kupedes disesuaikan namanya menjadi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). (PPK-BM, 2007)

Bisnis Mikro dalam PPK-BM ini merupakan salah satu segmen bisnis BRI yang merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan oleh BRI Unit dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* untuk pembiayaan usaha mikro. Penyusunan PPK-BM dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan bisnis BRI Unit. Hal ini bertujuan agar sasaran bisnis dapat

tercapai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi asas pemberian kredit yang sehat. Kredit yang dimaksud dalam PPK-BM adalah Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) yang merupakan kredit mikro yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah.(PPK-BM, 2007)

Kupedes disalurkan melalui unit kerja BRI yaitu BRI Unit. Salah satunya adalah BRI Unit Plaza yang merupakan salah satu unit kerja di wilayah BRI Kantor Cabang Probolinggo yang merupakan Unit tertua di Probolinggo yang berdiri pada tahun 1970. BRI Unit Plaza melayani dan menyalurkan Kupedes terhadap sektor usaha seperti perdagangan, perindustrian dan jasa komersial. Sektor usaha yang paling banyak dibiayai Kupedes adalah sektor perdagangan. Hal ini karena letak BRI Unit Plaza yang berada di pusat perekonomian Probolinggo dimana terdapat banyak para pelaku usaha perdagangan.

Dalam penyaluran Kupedes, BRI Unit Plaza mengalami beberapa kendala seperti jumlah nasabah yang menunggak setiap tahunnya. Hal ini menjadi masalah karena dapat memperbesar nilai NPL akibat kredit macet. NPL (*Non Performing Loan*) adalah rasio kredit bermasalah yang dihadapi pihak bank. Semakin rendah nilai indikator ini maka semakin baik kinerja perbankan karena bank dapat meminimalisasi kredit macet. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena

itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Macetnya kredit bukanlah sepenuhnya kesalahan nasabah, bank juga berperan di dalamnya. Bank memiliki banyak jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kredit macet dengan para nasabahnya. Dan masih banyak langkah-langkah penyelesaian yang harus dijalankan Bank. Seperti *reconditioning* (perubahan persyaratan), *rescheduling* (penjadwalan ulang), *restructuring* (perubahan struktur kredit), dan *injection* (penambahan plafond) dan lain sebagainya. Langkah seperti di atas menurut Achsanul, merupakan prosedur yang harus dijalankan Bank. Namun, Bank seringkali tidak mematuhi prosedur tersebut. (www.okezone.com)

Adapun beberapa hasil penelitian yang meneliti tentang kredit macet adalah:

Wahyutin (2009) menyimpulkan bahwa manajemen kredit yang digunakan pada koperasi “Usaha Tama” Ponggol Blitar dalam mengelola kredit sudah bisa dikatakan cukup baik. Dalam pemberian kredit Koperasi “Usaha Tama” mempunyai perencanaan matang sebelum kredit diberikan pada nasabah.

Amalia, Yulia (2006), Bank selaku kreditor tidak perlu ragu untuk menggunakan instrumen Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dalam rangka menyelesaikan kredit macetnya, mengingat instrumen ini merupakan sarana penyelesaian kredit macet yang paling efektif dan efisien. Serta Agar penyelesaian kredit macet dan pelaksanaan lelang dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang relatif singkat, maka dibutuhkan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara para pihak.

Husnalita, dkk. (2004), Pelaksanaan penyaluran kredit usaha tani memang telah memenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan. Namun sayangnya, dalam pengembalian dana kredit usaha tani tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kadang terpaksa harus dihadapi petani anggota koperasi yang menjadi objek penyaluran dana kredit usaha tani tersebut. Selain itu, Itikad baik dan kesadaran dari anggota koperasi sangat menentukan bagi kelancaran pengembalian dana kredit usaha tani ini.

Dari beberapa penelitian di atas bisa dilihat, bahwa setiap lembaga keuangan atau non-keuangan masih ada kekurangan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit maupun penyelesaian kredit yang telah ditentukan prosedurnya oleh Bank Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang implementasi manajemen kredit (yang berfokus pada Pemberian kredit kepada nasabah Bisnis Mikro, kendala penyebab kredit macet dan implementasi penanganan kredit macet itu sendiri). Sedangkan beberapa penelitian diatas, hanya berfokus pada implementasi pemberian kredit kepada nasabah secara umum dan anggota koperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai manajemen kredit Kupedes dan efektivitas penyaluran Kupedes, agar bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai manajemen kredit yang dilakukan oleh BRI, timbulnya kredit macet di dunia perbankan dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank khususnya PT. BRI (Persero) Tbk. Dan mengukur kinerja penyaluran Kupedes, yang selanjutnya

penelitian ini diberi judul “**ANALISIS MANAJEMEN KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN KUPEDES (KREDIT UMUM PEDESAAN)** (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Probolinggo Unit Plaza Tahun 2009-2011)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian kredit pada nasabah Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza?
2. Apakah penyaluran Kupedes yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza sudah efektif?
3. Kendala apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada nasabah Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza?
4. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada nasabah Bisnis Mikro yang dilaksanakan oleh PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi prosedur pemberian kredit pada nasabah Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza.

2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kupedes yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza.
3. Untuk mendeteksi kendala penyebab terjadinya kredit bermasalah pada nasabah Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza.
4. Untuk menganalisis penyelesaian kredit macet pada nasabah Bisnis Mikro yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plaza.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan kembali untuk pemberian kredit kepada nasabah, khususnya UMKM.

2. Bagi Akademis

Menyediakan bahan referensi tambahan, khususnya bagi kalangan akademis untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan atau perbandingan dalam penelitian selanjutnya serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sama.

1.4 Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus menggambarkan tentang manajemen kredit pada nasabah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berfokus pada

implementasi pemberian kredit, penyebab kredit macet dan implementasi penanganan kredit macet pada nasabah Bisnis Mikro. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas penyaluran kredit, peneliti melakukan penyebaran angket dan wawancara terhadap nasabah Bisnis Mikro dan peneliti menganalisis laporan mengenai penyaluran kredit pada tahun 2009-2011.

